

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Biografi Abdurrahman Wahid

Orang yang dikenal dengan nama KH. Abdurrahman Wahid terkenal dengan kontroversi dan komitmennya yang kuat dalam melestarikan kelompok minoritas dan mendukung hak asasi manusia (HAM). Namun, cara beliau menyampaikan pemikirannya dengan pendekatan yang ringan dan informal sehingga membuat orang tertawa juga tidak kalah menariknya. Semua ciri-cirinya ini menggambarkan cara hidup yang lugas dalam komunitas yang kurang beruntung dan kelas bawah. Filsuf dan cendekiawan Muslim Abdurrahman Wahid ataupun sering dikenal dengan Gus Dur, bergerak dalam bidang sains dan teologi Islam.

Gus Dur juga dianggap sebagai orang suci dalam masyarakat Muslim konvensional. Beliau menunjukkan hal ini dengan bertindak sesuai dengan ide-ide yang dia yakini akurat. Gus Dur terkenal sebagai sosok yang ikhlas baik dalam sikap maupun perbuatannya. Beliau selalu berusaha tanpa mengharap imbalan dan sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah¹.

Gus Dur yakni seorang kiai dan pemimpin yang menjunjung tinggi hak-hak kaum tertindas dan berperilaku rendah hati. Beliau kuat dan berdedikasi untuk memperbaiki situasi masyarakat. Gus Dur terkenal kontroversial dan gigih dalam membangun masyarakat demokratis. Gusdur yakni anak pertama dari enam bersaudara oleh pasangan K.H. Wahid Hasyim dan Nyai Solehah. Gus Dur lahir pada hari keempat bulan kedelapan penanggalan Islam. Lebih spesifiknya, beliau lahir ketika tanggal 7 September 1940.²

Gus Dur secara genetik cenderung berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, K. H. Wahid Hasyim, yakni keturunan K. H. Hasyim Asy'ari yang juga mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan Jam'iyah Nahdatul Ulama (NU), organisasi

¹ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hal. 51

² Rifani Rianasati, Zulaikha Fitri Nur Ngaisah, Hendri Hermawan Adinugraha, Razie Bin Nasarrudin, "Hubungan Islam dan Negara dalam Perspektif Abdurrahman Wahid", *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, hal. 193, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/download/7085/version/10723/4596/27407>

Islam paling besar di Indonesia. Pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri, yakni ayah dari ibunya, Hj. Siti Solehah. Tokoh NU terkemuka lainnya yakni Kyai Bisri yang menggantikan K. H. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam PBNU. Oleh karena itu, Gus Dur yakni cicit dari dua tokoh berpengaruh Indonesia serta dua tokoh ulama NU terkemuka.

Kakak-kakaknya menilai Gus Dur yakni pemuda riuh yang tidak bisa dipaksa. Sebagai gambaran kenakalannya, Gus Dur melukai lengannya sebanyak dua kali akibat kegemarannya memanjat pohon saat usianya belum genap 12 tahun. Cabang pohon yang diinjaknya patah, mengakibatkan cedera pertama lengan patah. Kedua, saat makan di atas pohon dan tertidur, Gus Dur nyaris kehilangan tangannya³.

Gus Dur yang terkenal sebagai seorang kutu buku ini lebih memilih belajar buku untuk memperluas ilmunya dibandingkan menghabiskan masa mudanya dengan bermain contohnya kebanyakan anak-anak. Gus Dur melakukan pemilihan tinggal bersama kakeknya dibandingkan ayahnya saat masih kecil. Gus Dur telah mengenal tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh terkemuka sejak ia masih kecil, sejak kakeknya terkenal dan sering dikunjungi oleh mereka.

Ketika Gus Dur masih kecil, ayahnya sering mengirimnya ke rumah seorang Jepang bernama William Iskandar Bueller yang tinggal di Jakarta serta masuk Islam setelah pindah ke sana sepulang sekolah hingga sore hari. Gus Dur melanjutkan studinya di bidang sastra dan bahasa lain di sini⁴. Gus Dur menghabiskan sebagian besar masa remajanya di Yogyakarta serta Tegalrejo (Magelang). Kedua lokasi ini menandai titik balik dalam evolusi ilmu pengetahuan.

Gus Dur kemudian mulai mempersiapkan awal pendidikannya di Mesir setelah tinggal di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang pada masa itu. Namun, ketika Gus Dur

³ Rifani Rianasati, Zulaikha Fitri Nur Ngaisah, Hendri Hermawan Adinugraha, Razie Bin Nasarrudin, "Hubungan Islam dan Negara dalam Perspektif Abdurrahman Wahid", *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, hal. 193, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/download/7085/version/10723/4596/27407>

⁴ Abdullah, "Kurikulum Pesantren dalam Perspektif Gus Dur; Suatu Kajian Epistemologis, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* (2016): hal. 230-248. <https://media.neliti.com/media/publications/117258-ID-kurikulum-pesantren-dalam-perspektif-gus.pdf>

berada di Mesir, pamannya memintanya untuk menikah dengan Sinta Nuriyah, putri H. M. Sakur, sebelum berangkat ke Mesir. Pernikahan tersebut dilangsungkan pada 11 Juli 1968. Pada tanggal 11 September 1971, saat Gus Dur kembali ke Indonesia, resepsi pernikahan pun dilangsungkan. Gus Dur beruntung memiliki empat orang putri dari pernikahannya dengan Siti Nurriyah. Mereka yakni Anita Hayatunnufus, Inayah Wulandari, Zannuba Arifah Chafsof, dan Alisa Qotrunnada Munawwarah (Lisa). Gus Dur tidak membesarkan anak-anaknya secara otoriter, mengontrol pekerjaan dan pilihan pendidikan mereka. Gus Dur hanya memberikan arahan dan nasehat.

Gus Dur menggantikan B.J. Habibie selaku presiden ke-4 RI setelah dilakukan pemilihan oleh MPR hasil pemilu 1999, beliau mengundurkan diri dari jabatan ketua umum. Masa kepresidenan Gus Dur hanya berlangsung beberapa bulan saja, yakni sejak tanggal 20 Oktober 1999 hingga sidang MPR tanggal 21 Juli 2001. Pemerintahan Gus Dur dibentuk sebagai Kabinet Persatuan Nasional setelah ia terpilih menjadi presiden.

Gus Dur meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumuo (RSCM), Jakarta, pukul 18.45 WIB, akibat penyakit (jantung dan ginjal) yang sudah lama dideritanya⁵.

2. Riwayat Pendidikan

Di SD KRIS Jakarta Pusat, Gus Dur memulai pendidikan sekolah dasar. Gus Dur yang saat itu harus pindah ke Jakarta sebab ayahnya diangkat menjadi menteri agama. Pada tahun 1949, harus pindah ke SD Mantraman Perwari saat ia duduk di bangku kelas empat.⁶ Gus Dur melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Ekonomi Yogyakarta (SMEP) setelah menyelesaikan sekolah dasar. Gus Dur belajar bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, selain bersekolah di SMEP.

Gus Dur pindah ke Magelang setelah memperoleh gelar sarjana dari SMEP pada tahun 1957 dan bersekolah di pesantren Tegalrejo di sana untuk melanjutkan studinya. Berkat prestasinya, Gus Dur mampu menyelesaikan studinya dalam waktu dua tahun, bukan empat tahun seperti yang diharapkan.

⁵ Alif Pratama Susila, “Studi Analisis terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Agama”, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, hal. 114-115, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/4254>

⁶ Alif Pratama Susila, “Studi Analisis terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Agama”, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, hal. 115, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/4254>

Gus Dur melanjutkan studinya pada tahun 1959 di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Kemudian Gusdur setelahnya memiliki jabatan awal Gus Dur yakni sebagai guru di Pondok Pesantren Tambak Beras, dan kemudian naik menjadi kepala madrasah⁷.

Pada tahun 1963, Kementerian Agama memberikan Gus Dur beasiswa agar ia dapat melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gus Dur harus mendaftar di kelas *alimah* (kelas persiapan) ketika pertama kali tiba di Mesir sebelum dapat memulai perkuliahan di universitas. Gus Dur berhasil menyelesaikan program persiapannya namun, saat Gusdur belajar di Mesir, ia mendapat kesan bahwa ia meliputi banyak hal. Akibatnya, ia ragu untuk menempuh pendidikan resmi dan malah menyalurkan minatnya dengan mengikuti pertandingan sepak bola, membaca buku dari perpustakaan, dan menonton film dari Perancis.

Untungnya keadaan yang membosankan tersebut akhirnya dapat terobati ketika Gus Dur mendapatkan beasiswa di Universitas Baghdad pada tahun 1966. Disinilah Gusdur mulai belajar dengan lebih ketat daripada di Kairo. Walaupun Gusdur memiliki jadwal yang padat, beliau juga masih meluangkan waktunya untuk menonton film-film Perancis.

Gus Dur belajar agama selain akademisi di bawah bimbingan Imam Junaid Al-Baghdadi, pendiri aliran tasawuf dan tokoh jamaah NU. Makam Syekh Abdul Qadir al-Jailani yakni salah satu dari beberapa makam wali yang sering dikunjungi Gus Dur. Gus Dur menemukan landasan spiritualnya di sini. Gus Dur akhirnya menyelesaikan studinya di Universitas Bagdad pada tahun 1970 dan mendapat gelar sarjana (S1).

Kurang dari setahun, Gus Dur melanjutkan perjalanannya ke Jerman, Prancis, serta Belanda. Kemudian Gus Dur mendapat tawaran untuk mendaftar program Magister (S2) di Universitas Sorbonne semasa di Perancis. Namun, dia menolak tawaran tersebut karena dia yakin itu akan memakan waktu dan memilih untuk kembali ke negaranya sendiri. Gus Dur memulai babak baru dalam hidup dan karir profesionalnya ketika kembali ke Jawa⁸.

⁷ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hal. 52-53

⁸ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1999), Halaman 32.

3. Perjalanan Karir

a. Guru di Pesantren Tebu Ireng

Gus Dur memulai karirnya sebagai guru ketika kembali ke tanah air pada tahun 1970. Gus Dur mulai bekerja di Fakultas Ushuluddin Universitas Tebu Ireng pada tahun 1971 sebagai dosen pada mata pelajaran Hikam, Tasawuf, dan Fiqih. Gus Dur pun kembali mengeksplorasi kemampuannya sebagai penulis dan jurnalis pada tahun itu.

Bermula ketika Gusdur sering diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi mengenai keagamaan ataupun hal tentang pesantren yang kemudian membuat pamannya, yakni K.H. Yusuf Hasyim meminta Gusdur guna menjadi sekretaris di Pesantren Tebu Ireng.

Setelah tiga tahun berjalan, Gusdur aktif selaku seorang penulis serta kolumnis serta menjadi sekretaris di Pesantren Tebu Ireng. Banyak tulisan-tulisan Gusdur yang mendapat perhatian dari intelektual seperti Djohan Efendi karena Gusdur dalam tulisannya jarang menggunakan catatikan kaki dan tulisan Gusdur dimanifestasikan menjadi pemikirannya sendiri.⁹

b. Bergabung dalam Kegiatan LSM

Ketika Abdurrahman Wahid terlibat dalam aktivitas di Pondok Pesantren Tebu Ireng dan selaku sekretaris pamannya serta menjadi narasumber berbagai kegiatan diskusi, Abdurrahman Wahid juga mulai ikut terlibat dalam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yakni LP3ES. Dalam LSM tersebut, Abdurrahman Wahid ikut dalam sebuah proyek guna pengembangan pesantren dan mendirikan P3M yang dimotori langsung oleh LP3S.

Kemudian Gus Dur pindah ke Jakarta pada tahun 1979 dan mendirikan Pondok Pesantren Ciganjur. Selain mendirikan P3M, Gus Dur membantu sejumlah kalangan, antara lain LSM, ORSOS, dan lembaga swadaya masyarakat. Dari sudut pandang ini, Gus Dur menginisiasi perbincangan komprehensif dengan berbagai kelompok

⁹ Indo Santalia, “K.H. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi dan Pribumisasi”, *Jurnal A-Adyaan* (2015), hal. 1381-139. <https://journal.uin-alaudin.ac.id/index.php/adyan/article/view/1340/1311>

lintas agama mengenai persoalan agama, masyarakat, dan politik.¹⁰

c. Berkiprah di Nahdlatul Ulama

Ayahnya, K. H. Wahid Hasyim, yakni keturunan K. H. Hasyim Asy'ari yang juga mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang serta Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri, yakni ayah dari ibunya, Hj. Siti Solehah. Tokoh NU terkemuka lainnya yakni Kyai Bisri yang menggantikan K. H. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam PBNU. Oleh karena itu, Gus Dur yakni cicit dari dua tokoh berpengaruh Indonesia serta dua tokoh ulama NU terkemuka.

Pada tahun 1979, saat konvensi NU di Semarang, Gus Dur terlibat dengan organisasi terbesar di Indonesia. Beliau terlibat dengan berperan sebagai khatib ataupun sekretaris. Kemudian Gus Dur secara aklamasi dipilih oleh tim *ahl all wa al 'aqdi* pada tahun 1984 yang diketuai oleh KH. As'ad Syamsul Arifin untuk menjadi Ketua Umum PBNU selama tiga tahun berturut-turut dalam muktamar yang diadakan NU. Masa bakti Gus Dur dalam menjabat sebagai ketua PBNU akhirnya lepas ketika Belau menjabat sebagai Presiden keempat RI menggantikan B.J. Habibie hingga akhirnya lengser dari pimpinan PBNU.

d. Kiprah Politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adaah selaku partai politik yang lahir dari era Reformasi 1988. Sehari seteh runtuhnya rezim Soeharto yakni Orde Baru, Pegurus Besar Nahdlatul Ulama mendapatkan bermacam usulan dari Nahdliyin seuruh Indonesia untuk membentuk partai politik yang mewadahi aspirasi kaum Nahdliyin serta umat Indonesia.

Kemudian PBNU menampung usulan tersebut. Namun, PBNU secara berhati-hati agar NU tidak terhubung dengan partai politik manapun sesuai dengan Muktamar NU 1984. Sikap yang diambil PBNU membuat Nahdliyin merasa

¹⁰ Zainal Abidin, "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Pluralitas", *Jurnal Humaniora* (2012): hal. 378-379. <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3332>

tidak puas dan terus-menerus mendorong agar pembentukan partai segera dilakukan. Bahkan, terdapat sejumlah partai politik yang mengakui bahwasanya partai tersebut berbasis NU, contohnya Partai Bintang Sembilan dan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon.

Partai Kebangkitan Bangsa akhirnya didirikan pada 23 Juni 1998 oleh Gus Dur dan tokoh NU lainnya. Partai tersebut diberi nama “Partai Kebangkitan Nasional”. Pengumuman tersebut resmi disampaikan di kediaman Gus Dur yang saat itu menjabat selaku Ketua PBNU. Sosok Gus Dur memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan partai ini, dan berpengaruh signifikan. Gus Dur tidak hanya menjadi tokoh pendiri PKB, namun ia juga terus menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro atau Dewan Pertimbangan Partai hingga akhir hayatnya.

Karisma Gus Dur dalam ketokohnya di PKB, terbukti dengan dengan berhasilnya PKB menempati urutan ketiga dalam hasil Pemilu 1999 dan berhak mendapatkan 5 kursi. Kemudian pada tahun 2004, PKB berhasil memperoleh 52 kursi. Dari sini terlihat bahwasanya meskipun PKB yakni partai yang baru berdiri, tetapi patut untuk dilakukan pertimbangan.¹¹

e. Menjadi Presiden

Gus Dur terpilih sebagai presiden ke-4 RI menggantikan B.J. Habibie setelah dipilih MPR dari hasil pemilu 1999. Gusdur menjabat sebagai Presiden Indonesia pada saat itu ketika bangsa Indonesia tengah berada pada keadaan krisis yang begitu hebat. Sehingga bagi masyarakat, kepemimpinan Gus Dur diharapkan mampu untuk merubah kehidupan Indonesia menjadi lebih baik.

Masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia telah memberikan bukti ketajaman politik Gus Dur melalui tindakannya. Gus Dur tidak hanya dianggap memiliki pemahaman agama, namun ia juga dinilai mampu menangani permasalahan politik yang dihadapi bangsa. Era baru dan kemenangan politik santri sama-sama

¹¹ Ach. Khoiri, “Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Studi Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Hubungan Islam dan Negara”, *Voice Justicia Jurnal Hukum dan Keadilan* (2019): hal. 14-15. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/download/831/563/>

dilahirkan oleh Gus Dur yang punya sejarah menjadi anggota Santri.

Pemerintahan Gus Dur dibentuk sebagai Kabinet Persatuan Nasional setelah beliau terpilih menjadi presiden. Gus Dur juga mulai melaksanakan dua reformasi pemerintahan, termasuk penghapusan Kementerian Sosial dan Penerangan. Megawati Soekarno Putri diangkat menjadi wakil Gus Dur. Selain itu, keberhasilan Gus Dur menjadi Presiden juga berkat dukungan sejumlah partai beraliran Islam. Salah satu kelompok tersebut adalah PAN (Partai Amanat Nasional) yang saat itu diketuai oleh Amin Rais. Amin Rais merupakan sosok yang sangat mendukung upaya Gus Dur menjadi presiden.

Pada masa Gus Dur berada di puncak kekuasaan, bangsa Indonesia dilanda masa krisis yang sangat parah, khususnya di bidang perekonomian. Jangka waktu yang dimaksud disebut juga dengan masa transisi demokrasi pada jangka waktu tersebut. Selain persoalan tersebut, persoalan politik dan agama membuat kondisi bangsa tidak stabil pada saat itu. Akhirnya pada 23 Juli 2001 Gusdur meletakkan jabatannya selaku Presiden. Sehingga Gus Dur tidak menuntaskan kepemimpinannya selaku presiden dalam 5 tahun karena persoalan bangsa yang sangat kompleks.

B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data yakni gambaran dari sebuah data yang akan diterapkan pada suatu penelitian¹². Ketika pengujian deskripsi data ini, peneliti akan melakukan percobaan guna dapat mengetahui gambaran ataupun keadaan dari objek penelitian. Dari pengumpulan data kepustakaan, dengan pandangan yang di ambil dari Abdurrahman Wahid berupa pemikiran objek peneliti terkait dengan relasi agama dengan negara, dan tantangan yang dihadapi oleh objek peneliti dalam melakukan penyampaian relasi agama dengan negara.

1. Agama

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, agama berperan dalam cara pandang hidup berbangsa dan bernegara, atau dengan kata lain sebagai sumber Pancasila di samping sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu, hal ini merupakan aspek paling

¹² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 134.

mendasar dari hubungan yang terjalin antara Islam dan Pancasila. Ideologi negara dan pedoman hidup berbangsa yang dalam hal ini disebut Pancasila bersumber dari sejumlah prinsip mulia yang terdapat dalam agama.

Dalam hal ini tidak berarti agama akan terputus hubungannya dengan pemeluknya karena “campur tangan” ideologi bangsa. Sebaliknya, bangsa akan menentukan bahwasanya warga negara harus taat terhadap agama serta kepercayaan masing-masing yang diyakini. Pada saat yang sama, ideologi akan memastikan bahwa penganut agama lain bebas menjalankan agamanya masing-masing tanpa campur tangan.

Oleh karena itu, di negara yang majemuk seperti Indonesia, pemerintah perlu memberikan pelayanan yang setara kepada semua agama yang diakui. Hal ini memiliki arti bahwasanya negara harus menjamin pola pergaulan yang serasi dan seimbang antara sesama umat beragama di Indonesia. Sehingga peranan Islam dan Pancasila harus saling mengisi dan mendukung.¹³ Agama mengatur kepercayaan kepada Tuhan dan menjadi peran sebagai sumber pandangan hidup yang menjadi salah satu sumber bagi Pancasila disamping sumber-sumber lain.

2. Negara (Indonesia)

Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka dari tahun 384 hingga 322 SM, mendefinisikan negara sebagai otoritas kolektif yang terdiri dari keluarga dan komunitas dengan tujuan mencapai kesejahteraan tertinggi umat manusia. Negara juga suatu masyarakat yang terintegrasi sebab memiliki otoritas yang memiliki sifat memaksa yang melampaui individu atau kelompok dalam masyarakat tersebut.¹⁴

Sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid, Indonesia yakni sebuah negara yang memiliki dasar pada sebuah konsensus yang diwujudkan melalui Pancasila. Abdurrahman Wahid memiliki keyakinan bahwasanya ideologi Pancasila di Indonesia harus terus dipertahankan. Seluruh warga negara Indonesia harus berpegang teguh pada Pancasila selaku kriteria demokratisasi serta perkembangan spiritual pada konteks nasional.

Abdurrahman Wahid adalah tokoh yang mendorong diterimanya Pancasila sebagai ideologi negara. Ada dua alasan

¹³ Abdurrahman Wahid. *Mengurai hubungan Agama dan Negara*. (Jakarta: Grasindo, 1999), Halaman 67.

¹⁴ Usman, “Negara Dan Fungsinya,” *Al-Daulah* 4 (2015): hal. 130–39, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1506/1445.

penerimaan tersebut: pertama, Islam, khususnya agama Fitriah, yaitu agama yang cita-cita Islamnya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila di Indonesia. Kedua, baik Islam maupun Pancasila mempunyai nilai tauhid yang mengacu pada agama Islam dan wawasan negara Indonesia yang keduanya terjamin.¹⁵

3. Relasi Agama dengan Negara

Pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai hubungan antara agama dan negara merupakan contoh fenomena sosial yang signifikan. Menurut penegasan Abdurrahman Wahid, Islam tidak mengenal doktrin apapun mengenai negara, dan dalam hal ketatanegaraan, Islam tidak mempunyai prinsip yang baku. Hal yang paling penting bagi Gus Dur ada tiga, yakni: 1. Mengedepankan prinsip permusyawaratan, 2. Ditegakkannya keadilan, 3. Adanya jaminan kebebasan. Begitu pula dengan negara yang didalamnya tidak memiliki doktrin bahwasanya negara harus membuat agama sebagai hal yang formal dalam konstitusi.

Gus Dur berupaya mewujudkan keselarasan interaksi paralel antara negara dan agama. Dalam benaknya ia menyadari tantangan besar yang dihadapi dalam proses pembentukan negara. Tantangan tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman pihak-pihak yang berpandangan bahwa negara Indonesia perlu menjadi negara yang menganut falsafah Islam. Kemudian Gus Dur berpendapat bahwasanya tidak ada yang perlu dipertentangkan antara agama dengan negara karena keduanya memiliki relasi ataupun hubungan.

Pemikiran Gus Dur banyak mendapat sambutan baik bagi para para lapisan termasuk non-muslim karena sifat inklusif yang dimiliki oleh Gus Dur. Keyakinan terhadap agama satu sama lain patut menjadi teladan karena sebagai sisi yang netral dari sistem politik. Gus Dur malah dengan tegas menyatakan bahwasanya tanpa adanya Pancasila, negara akan terhenti dan akan gagal.¹⁶

4. Tantangan Abdurrahman Wahid dalam Penyampaian Mengenai Relasi Agama dengan Negara dan Relevansinya dengan Keadaan Masa Kini

Hubungan antara agama (Islam) dan negara secara keseluruhan diyakini sangat berarti dalam kehidupan berbangsa

¹⁵ Abdurrahman Wahid, *Mengurai hubungan Agama dan Negara*. (Jakarta: Grasindo. 1999), Halaman 71.

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Mengurai hubungan Agama dan Negara*. (Jakarta: Grasindo. 1999), Halaman 54.

dan bernegara, khususnya ketika pembangunan dilakukan di negara-negara berkembang. Sangat penting bagi kita semua untuk memahami hubungan ini dengan bekerja sama. Urgensi dari situasi ini terletak pada kenyataan bahwa kita perlu mengatasi pengaruh banyaknya data yang menunjukkan hambatan besar terhadap kemajuan. Kesulitan-kesulitan ini diakibatkan oleh miskomunikasi yang mendalam antara mereka yang memerintah ideologi resmi dan para pemimpin kelompok agama.

Keterkaitan antara agama dan ideologi negara telah lama terganggu oleh kesalahpahaman ini sehingga membuat kehidupan politik tidak stabil di sebagian besar negara-negara berkembang. Pada keadaan ini, banyak energi yang terbuang hanya untuk mencegah gerakan keagamaan yang dianggap berpotensi menentang ideologi negara menyebarkan pengaruhnya. Abdurrahman Wahid berpandangan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan pada persoalan ini. adapun tantangan dalam relasi agama dengan agama, yakni:¹⁷

- a. Adanya inisiatif, retorika politik dan kelompok agama yang dijinakkan oleh pemerintah

Sejumlah inisiatif dan retorika politik digunakan untuk melemahkan gerakan keagamaan. Di satu sisi, kelompok agama “dijinakkan” dengan adanya kucuran dana resmi yang besar untuk ibadah ritual, namun di sisi lain, mereka terpacu dengan upaya membungkam gerakan keagamaan.

Maksud dari kelompok agama “dijinakkan” yakni adanya inisiatif pemberian dana yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok agama dengan maksud agar kelompok agama tetap pada batasnya dan tidak sampai pada tindakan radikal ataupun tindakan yang ekstrim. Contohnya seperti pemberian dana pada pesantren, pemberian beasiswa kepada santri dan dibentuknya Kampung Moderasi. Hal ini juga yakni salah satu retorika politik dari pemerintah. Sehingga, bagi pemerintah dengan memberikan kucuran dana bantuan akan membungkam dan membuat batasan bagi para kelompok agama.

Namun bagi Abdurrahman Wahid, hal yang dilakukan oleh pemerintah ini yakni hal yang tidak baik.

¹⁷ Abdurrahman Wahid. *Membangun Demokrasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hal. 80-81

Seharusnya agama dan negara dibiarkan berjalan masing-masing namun tetap sesimbang ataupun saing melengkapi. Sehingga nilai-nilai keagamaan tidak akan hilang karena dibungkam dan hanya akan menonjolkan sisi kenegaraan.¹⁸

b. Adanya kelompok radikal

Penggunaan Islam secara legal dan formal dalam prinsip-prinsip kenegaraan diyakini dapat menimbulkan masalah psikologis bagi non-muslim yang juga yakni warga Indonesia dan berperan dalam pembangunan bangsa. Dalam hal ini terdapat kelompok yang menginginkan Indonesia menggunakan syariat Islam sebagai ideologi.

Contoh dari kelompok tersebut yakni Majelis Muhajidin Indonesia (MMI). Kelompok ini tidak ingin mengganti ideologi Pancasila, namun menginginkan bahwasanya seluruh hukum di Indonesia harus menggunakan hukum Islam. Selain itu ada pula Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang menginginkan untuk ditegakkannya syariat Islam diberbagai daerah.¹⁹

c. Peranan latar belakang pendidikan dan budaya serta minimnya Undang-Undang yang mengatur keyakinan beragama

Latar belakang pendidikan dan budaya masing-masing berperan dalam menentukan apakah seseorang masuk Islam sesuai dengan norma. Kemudian dari pendidikan dan budaya juga akan memengaruhi pemikiran para pembuat aturan Undang-Undang di negara Indonesia. Sehingga Undang-Undang yang mengatur keyakinan Islam masih minim ataupun masih sedikit bagi umat Islam dan wakil-wakil DPR dapat berupaya untuk mengesahkan undang-undang yang menganut keyakinan Islam jika mereka mempunyai pengaruh yang cukup di lembaga legislatif ataupun DPR²⁰.

¹⁸ Abdurrahman Wahid. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS 199,) Hal. 19.

¹⁹ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) hal.130.

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) hal.101

C. Analisis Data Penelitian

Tabel 4. 1. Teori Pemikiran dari Abdurrahman Wahid

No.	Teori	Pemikiran Abdurrahman Wahid	
		Agama	Negara
1	Teori Negara Karl Marx (Teori yang memahami bahwasanya kehadiran negara yakni bagian dari dinamika yang terjadi di masyarakat)	Dalam Islam, teori negara yang kontemporer tersebut tidak dijelaskan dengan spesifik.	Sistem demokrasi terdiri dari sistem demokrasi teokrasi, ataupun monarki Modelnya tergantung pada negara yang bersangkutan. Saat ini Indonesia menggunakan model Demokrasi Pancasila. Dalam model tersebut berarti setiap permasalahan yang ada perlu dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2	Teori Ideologi Kenegaraan Islam Al-Mawardi (Teori ini mendefinisikan negara sebagai alat ataupun sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan)	Islam sebagai sebuah ideologi yakni hal yang perlu dilakukan karena hal tersebut akan memutarbalikkan fungsi agama, negara, dan budaya serta tidak menghasilkan struktur yang lebih baik, namun justru akan mendorong keruntuhan yang bertumpu pada sekretariat dan konflik horizontal.	Jika Islam dijadikan sebuah ideologi akan meruntuhkan perbedaan agama yang terjadi di Indonesia karena di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama.
3	Teori Fundamental Abul A'la Al-Maududi (Teori ini	Islam sedang mengembangkan tiga sudut pandang dasar pada abad kedua puluh satu.	Dalam mengembangkan suatu negara yang fundamental tentu dipikirkan dalam

	<p>mengartikan bahwasanya fundamental yakni kembali pada dasar keimanan, pengukuhan dasar otoritas yang absah dan penekanan pada kekuasaan politik)</p>	<p>Pertama, ada gagasan untuk mendirikan negara yang Islami secara eksklusif, seperti Iran dan Arab Saudi. Gagasan kedua yakni Islam yakni agama negara yang diakui dan resmi, namun negaranya sendiribukan negara Islam, seperti Malaysia. Gagasan ketiga, meskipun tidak ada hubungan formal antara negara dan agama, negara-negara tertentu, seperti Indonesia, telah membenarkan penggunaan syariah seperti adanya Bank Syariah di Indonesia dan Provinsi Aceh yang menggunakan syariat Islam dalam sistem pemerintahannya.</p>	<p>beberapa sudut pandang karena sikap fundamental suatu negara akan mempengaruhi kehidupan kebangsaan.</p>
--	---	---	---

1. Teori Negara

Teori Negara yakni teori ilmu kenegaraan yang didalamnya membahas mengenai tahap-tahap yang dianggap sebagai perkembangan daripada terbentuk ataupun tercapainya negara yang paling sederhana sampai ke negara yang moderen. Teori Negara yang dirumuskan oleh Karl Marx mengakui bahwa keberadaan negara merupakan komponen integral dari proses yang terjadi dalam masyarakat. Dalam teori ini, negara dianggap sebagai sistem dominasi politik abstrak yang semakin menjauhkan individu dari ranah kehidupan publik. Selain itu, dalam teori ini menganggap bahwasanya pemerintah sebagai

aktor politik, hanya mementingkan kepentingan pribadi dan berusaha menguasai kekuasaan negara.²¹

Sedangkan pemikiran Abdurrahman Wahid terkait teori negara tersebut yakni sistem demokrasi terdiri dari sistem demokrasi teokrasi, ataupun monarki yang modelnya tergantung pada negara yang bersangkutan. Saat ini Indonesia menggunakan model Demokrasi Pancasila. Dalam model tersebut berarti setiap permasalahan yang ada perlu dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan dalam agama (Islam), teori negara yang kontemporer tersebut tidak dijelaskan dengan spesifik.

Teori Ideologi Kenegaraan Islam

Negara adalah alat atau sarana untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan, menurut definisi negara menurut Al-Mawardi. Umat Islam wajib menjunjung tinggi negara dan menegakkan kebijakan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana amanat hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, dan perseorangan berdasarkan hukum agama. Ini juga merupakan sistem yang mengatur apa yang mengatur negara dan pemerintahan.

Sedangkan pemikiran Abdurrahman Wahid terkait teori ideologi kenegaraan Islam yakni jika Islam dijadikan sebuah ideologi akan meruntuhkan perbedaan agama yang terjadi di Indonesia karena di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama. Sedangkan dalam agama (Islam), sebagai sebuah ideologi yakni hal yang perlu dilakukan karena hal tersebut akan memutarbalikkan fungsi agama, negara, dan budaya serta tidak menghasilkan struktur yang lebih baik, namun justru akan mendorong keruntuhan yang bertumpu pada sekretariat dan konflik horizontal.

Teori Fundamental

Teori fundamental yakni teori yang didalamnya berisi sesuatu perihal yang mendasar serta sangat penting selaku pedoman ataupun dasar untuk hal-hal tertentu. Sesuai pernyataan Abul A'la Al-Maududi, Definisi fundamental yang kedua adalah landasan keimanan, yang membantu memperkuat landasan otoritas yang sah dan memberi penekanan pada kekuasaan politik. Islam politik tidak bisa dipisahkan dari Islam politik. Oleh karena itu, hukum Islam memegang peranan penting dalam

²¹ Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx: Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal.51.

bernegara, dan kedaulatan negara bukan berada di tangan rakyat melainkan di tangan Tuhan. Menurut Abul A'la Al-Maududi, negara Islam harus bersifat universal atau komprehensif agar dapat dianggap sah. Tidak mungkin memisahkan Islam dari bagian kehidupan mana pun dalam kerangka bernegara, baik politik, ekonomi, sosial, seni, maupun pendidikan. Selain itu, Islam sangat menekankan norma-norma pedoman dan tujuan reformasinya bagi semua orang. Selain itu, Al-Maududi berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam, tidak boleh ada pemisahan atau pembedaan kelompok berdasarkan faktor-faktor seperti pekerjaan, kelahiran, atau kedudukan sosial. Sistem demokrasi Barat yang menempatkan rakyat pada kedudukan tertinggi dan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, langsung ditolak oleh pandangan tersebut.²²

Sedangkan sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid, Dalam mengembangkan suatu negara yang fundamental tentu dipikirkan dalam beberapa sudut pandang karena sikap fundamental suatu negara akan mempengaruhi kehidupan kebangsaan. Selain itu, dalam agama (Islam) sedang mengembangkan tiga sudut pandang dasar pada abad kedua puluh satu. Pertama, ada gagasan untuk mendirikan negara yang Islami secara eksklusif, seperti Iran dan Arab Saudi. Gagasan kedua yakni Islam yakni agama negara yang diakui dan resmi, namun negaranya sendiribukan negara Islam, seperti Malaysia. Gagasan ketiga, meskipun tidak ada hubungan formal antara negara dan agama, negara-negara tertentu, seperti Indonesia, telah membenarkan penggunaan syariah seperti adanya Bank Syariah di Indonesia dan Provinsi Aceh yang menggunakan syariat Islam dalam sistem pemerintahannya.

2. Relasi Agama dengan Negara

Mempelajari interaksi antara agama dan negara sebagai sebuah fenomena sosial sangatlah penting. Keimanan Islam dalam masyarakat tercermin dalam interaksi tersebut. Sesuai pernyataan penjelasan Gus Dur tentang keterkaitan Islam dan Negara:

“Islam tidak mengakui teori negara. Gus Dur mengklaim tidak ada pedoman pasti mengenai bentuk negara. Apakah suatu negara memilih menggunakan sistem

²² Agustina Damanik, "Konsep Negara menurut Abul A'la Al-Maududi", *Jurnal Al-Maqasid*, (2019): hal. 96, <https://jurnal.iain-padangsidiipuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/download/1720/1470>

demokrasi, teokrasi, ataupun monarki Modelnya tergantung pada negara yang bersangkutan”.²³

Bagi Gus Dur, terpenuhinya tiga syarat, pertama, memperhatikan asas musyawarah, yakni hal yang krusial. Keadilan ditegakkan, dan yang ketiga yakni *Al-Huriyyah*. Dalam berbagai kesempatan, Gusdur kerap mengemukakan bahwasanya konflik antara Islam dan negara serta pertentangan agama (Islam) dalam suatu bangsa sudah ada sejak sebelum negara kita merdeka dan terus berlanjut hingga saat ini bagaikan tali yang tak berujung.

Keadaan saat ini sudah melampaui cita-cita yang dicita-citakan negara ini ketika Indonesia merdeka karena Islam yaitu agama *rahmatan lil alamin* wajib membela negara yang pernah mengalami penjajahan dari negara lain, dan negara yang dijajah adalah negara yang sebagian besar dihuni oleh orang Yahudi dan Kristen. Hal ini bisa dilihat jika kita menilik sejarah para prajurit yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Abdurrahman Wahid juga memahami bahwasanya secara umum Islam tidak membedakan secara jelas antara persoalan politik dan agama. Pada kenyataannya, Islam dan politik tidak dapat dipisahkan.

Gagasan bahwasanya Islam yakni agama yang memerdekakan juga diamini oleh Abdurrahman Wahid. Islam diciptakan sebagai respon terhadap ketidakadilan dalam masyarakat komersial Arab yang ada saat itu, sesuai pernyataan bukti sejarah. Al-Qur'an secara tegas mendorong kepedulian terhadap hak asasi manusia dan pembelaannya terhadap eksploitasi oleh kelompok masyarakat yang lebih kaya. Islam menekankan pentingnya prinsip moral dalam kehidupan masyarakat karena peristiwa sejarah ini.

Meski sama-sama meyakini tidak ada hubungan formal antara agama dan negara, namun Abdurrahman Wahid mendasarkan sebagian besar alasannya pada anggapan bahwasanya Islam tidak menerima konsep pemerintahan melainkan moralitas sosial dan komunal. Saat mengkaji interaksi antara agama dan negara, Beliau mengemukakan gagasan berikut: Islam sebagai elemen pendukung kehidupan sosial budaya dan politik Indonesia. Beliau meminta umat Islam

²³ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: Rosda Karya, 1999), hal. 70.

berhenti memandang Islam sebagai ideologi pesaing demi tercapainya sintesa antara agama dan negara²⁴.

Sebaliknya, untuk menjamin seluruh umat beragama mempunyai peran yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Islam harus diposisikan sebagai kekuatan pelengkap dalam pembangunan sistem sosial, budaya, dan politik Indonesia. Pribumisasi Islam, yang merujuk pada proses penyadaran dan pendalaman pengetahuan terhadap nasionalisme Indonesia sebagai kumpulan pluralisme sosio-historis yang beragam. Pribumi dianggap sebagai sebuah kebutuhan dan bukan sebagai cara untuk mencegah konflik agama dan budaya. Karena pribumisasi Islam masih mempertahankan kualitas Islam, maka hal ini juga bukan yakni upaya untuk menundukkan Islam pada budaya daerah²⁵.

Sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid, menolak Islam sebagai sebuah ideologi yakni hal yang perlu dilakukan karena hal tersebut akan memutarbalikkan fungsi agama, negara, dan budaya serta tidak menghasilkan struktur yang lebih baik, namun justru akan mendorong keruntuhan yang bertumpu pada sekretariat dan konflik horizontal. Ia mengaku menentang pembentukan negara Islam karena dua alasan. Pertama, pembelaan normatif-teologis Negara Islam (*Daulah Islamiyah*), yang menyatakan bahwasanya kelompok tersebut tidak pernah dirujuk secara spesifik dalam Al-Qur'an. Padahal, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang berbunyi "*baldatun tayibatun wa rabbun ghafur*", yang lebih dalam konteks negara yang baik dan melimpah rahmat Allah.

Berdasarkan hal ini, Islam sekadar menawarkan prinsip-prinsip moral bagi cara hidup masyarakat. Beliau tidak memberikan gagasan yang konkrit. Prosedur suksesi yang konvensional dalam Islam tidak pernah ditunjukkan oleh sejarah Islam, yang menjadi dasar argumen kedua. Meskipun pemilihan kepala negara sangat penting untuk memahami sistem negara, hal ini dapat kita lihat dari fakta bahwasanya empat kalifah pertama setelah Nabi dipilih dengan menggunakan prosedur yang berbeda satu sama lain.

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: Rosda Karya, 1999), hal. 71.

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: Rosda Karya, 1999), hal 72.

Abdurrahman Wahid mempertanyakan pentingnya suatu teori kenegaraan Islam ketika subteks teori negara yang komprehensif, menyeluruh, dan rinci sangat berbeda dengan teori-teori lain sebelum menjelaskan ataupun mengungkapkan teori Islam dan negara. Abdurrahman Wahid mempelajari proses politik dan melakukan kajian ekstensif terhadap tesis ISIS dari sejumlah sumber sebelum sampai pada kesimpulan bahwasanya tesis tersebut tidak benar. Jika menciptakan perspektif Islam dalam bernegara yakni yang dimaksudkan, maka harus ada konsensus terlebih dahulu apa itu pandangan Islam untuk menciptakan pandangan Islam dalam menjalankan negara.

Hal ini hanyalah prinsip-prinsip dasar yang memandu pembentukan suatu bangsa, aturan-aturan formal yang mengatur kehidupan sehari-hari, dan apakah lembaga-lembaga suatu negara menjunjung prinsip-prinsip ini secara individu ataupun kolektif. Namun jika permasalahan ini diselesaikan maka akan banyak permasalahan yang dihadapi karena isu utama dalam cita-cita Islam sulit untuk diasimilasikan ke dalam kerangka konseptual nasional karena setiap agama, termasuk Islam menjangkau umat manusia secara keseluruhan, apapun latar belakang etnisnya.

Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam sendiri mempunyai sifat supranasional karena Islam sendiri akan kehilangan nilainya. Abdurrahman Wahid mengusulkan cara dengan menggabungkan peran keduanya untuk menyelesaikan persoalan ini. Beliau menegaskan, Islam, apapun bentuknya ataupun masyarakat dimana beliau menganutnya, dapat dipahami dari tujuannya sebagai pedoman hidup yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Abdurrahman Wahid mengawalinya dengan mendefinisikan politik dari sudut pandang Islam. Sesuai pernyataannya, Islam harus mampu membedakan dirinya dengan agama lain dan mengubah masyarakat karena risalah Nabi Muhammad SAW yakni transformasi dan emansipasi.²⁶ Politik penting bagi Abdurrahman Wahid, namun hanya dalam konteks pemberdayaan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk secara jujur menyuarakan keyakinan dan pemikirannya. Kebutuhan masyarakat harus diatasi melalui gerakan-gerakan yang merespons perubahan sosial sejak awal. Gerakan-gerakan ini tidak perlu mengambil bagian dalam

²⁶ Abdurrahman Wahid. *Mengurai hubungan Agama dan Negara*. (Jakarta: Grasindo. 1999), Halaman 44.

peristiwa-peristiwa politik yang hanya berfungsi untuk mempertahankan status quo.

Al-Qur'an, sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid, secara elegan mengungkapkan tujuan tersebut hanya dalam dua ayat. Pertama, Rasulullah SAW yakni contoh yang luar. Bagaimana Rasulullah SAW bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ingin menerima ridha Allah SWT pada akhirnya dan selalu sadar akan keagungan Allah SWT. Dalam perannya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang tertulis

“Aku tidak mengutus kamu (wahai Muhammad), tetapi Aku menciptakan kamu sebagai pembawa kekayaan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta yang ada di dalamnya, dengan tujuan untuk mempercantik kehidupan. Dia mampu membentuk kepribadian dengan cara demikian, dan pengembangan kepribadian.” mengarah pada munculnya pola hubungan interpersonal.”²⁷

Tidaklah penting mempertanyakan bentuk operasional masyarakat itu sendiri, selama tujuan mengejar kesejahteraan hidup masih dipegang sebagai standar bersama. Islam sebagai *way of life* memerlukan perwujudan dalam bentuk masyarakat yang terstruktur karena bentuk tersebut pada hakikatnya yakni konkretisasi interaksi sosial.

Dengan kata lain, bentuk yang paling mungkin diwujudkan bukanlah bentuk idealis yang dikemukakan oleh konsep Islam. Persoalan suksesi kepemimpinan dan pembagian kekuasaan tidak mungkin tidak diungkapkan secara eksplisit, sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid yang juga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sekadar memberi petunjuk untuk berkonsultasi mengenai hal tersebut. Isu sebesar ini tidak dilembagakan secara nyata. Sebaliknya, hal ini hanya diperlakukan dengan diktum bahwasanya isu tersebut harus diperdebatkan di antara individu di negara semacam itu²⁸.

Dengan kata lain, konsensus mengenai struktur negara tidak didasarkan pada *dalil naqli*; sebaliknya, hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Mengingat hal ini, belum ada model negara yang diterima secara universal, dan proses peralihan

²⁷ Abdurrahman Wahid. *Mengurai hubungan Islam dan Negara*. (Jakarta: Grasindo, 1999), Halaman 74.

²⁸ Abdurrahman Wahid. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. (Yogyakarta: LKIS, 1999) Halaman 16.

kekuasaan masih dilimpahkan kepada Rasulullah, baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun melalui transmisi Hadits. Abdurrahman Wahid memberikan penjelasan yakni: Islam tidak mengenal ideologi negara, namun sebaliknya doktrin Islam tentang negara yakni konsep keadilan dan kemakmuran. Hal ini yakni kehendak Islam sepanjang pemerintah dapat mencapai dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Jelas bagi umat Islam yang paling penting yakni peraturan (*al-hukum*), karena ini yakni gagasan dasar Islam tentang masyarakat, bukan negara (*ad-dawlah*), yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Akibatnya, istilah "kenegaraan" dalam Al-Qur'an tidak menggunakan kata Arab "*ad-dawlah*", sebaliknya ini diterjemahkan sebagai "*baldah*" dalam istilah geografis. Nabi Muhammad dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kepala dan pemimpin umat ataupun masyarakat melalui wahyu dan Abdurrahman Wahid menjelaskan sejarah dinasti Islam awal untuk mendukung hal ini.

Sayyidina Abu Bakar akhirnya terpilih sebagai pemimpin. Umar Ibnu Khattab diinstruksikan untuk mengambil alih jabatan pemimpin oleh Abu Bakar ketika dia sakit parah dan di ambang kematian. Sayyidina Umar menginstruksikannya untuk menunjuk tujuh anggota Dewan Pemilihan, termasuk putranya Abdullah, karena ia akan meninggal dunia, namun menetapkan bahwasanya Abdullah tidak boleh dipilih. Usman bin Affan akhirnya diangkat menjadi khalifah, namun kematiannya meninggalkan pesan yang tidak jelas. Nasib penerusnya juga sama.

Prosedur ini mengarah pada kesimpulan bahwasanya pada awalnya hanya ada dinasti. Pada struktur dinastinya, negara Islam dalam pelebagaan politiknya cenderung menjunjung status quo.²⁹ Islam, sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid tidak menerima konsep pemerintahan yang baku. Islam tampaknya tidak mengikuti pola tertentu ketika menyangkut aspek administrasi yang paling mendasar, yakni persoalan suksesi kekuasaan dalam penggantian.

Mereka kadang-kadang juga menggunakan sistem yakni "*ahl-hall wa al-'aqd*" Padahal persoalan suksesi yakni salah satu persoalan yang paling mendesak di pemerintahan. Padahal jika Islam punya konsep, hal itu tidak akan terjadi hanya dalam waktu tiga belas tahun, apalagi para sahabat Rasulullah yakni orang-

²⁹ Abdurrahman Wahid. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS 199,) Halaman 6.

orang yang paling takut padanya. Ketiga model *istikhlaf*, *bai'at*, dan *ahl al-hall wa al-'aqd*, semuanya berlangsung secara bersamaan.

3. Islam dan Ideologi Pancasila

Islam dapat beroperasi secara utuh dalam masyarakat nasional, prinsip-prinsip fundamentalnya harus dikembangkan menjadi etika masyarakat. Islam berfungsi sebagai etika sosial yang akan mengarahkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang luhur, karena pada akhirnya manusiakni yang menjadi sasaran upaya perbaikan kehidupan. Islam tidak berfungsi sebagai negara tertentu.

Hanya karena lebih efisien, untuk mencapai tujuan-tujuan ini akan menggunakan struktur negara-bangsa dibandingkan jenis organisasi sosial lainnya. Beliau mempunyai pandangan mengenai kontroversi seputar ideologi negara bahwasanya tidak ada negara yang sempurna, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mencari negara yang sempurna. Islam tidak menyebutkan ataupun menuntut negara ideal. Bukan sebagai bentuk pemerintahan, tapi sebagai keimanan, Allah menganugerahkan Islam. Islam akan menjadi luar biasa jika ia menjunjung tinggi moralitas di atas politik, yakni jika Islam tidak menampilkan wajah politik.

Gus Dur menyampaikan bahwasanya Beliau lebih fokus mewujudkan nilai-nilai fundamental Islam, yakni keadilan, kemakmuran, dan kesetaraan bagi seluruh umat manusia. Sesuai pernyataan Gusdur, tidaklah Islami jika kita terus berpikir bahwasanya Islam harus lebih unggul dari agama lain. Sebenarnya hal ini bertentangan dengan Islam. Abdurrahman Wahid menggambarkan unsur agama dalam hal ini:³⁰

a) Agama dan Budaya

Agama dan budaya mempunyai keterkaitan yang sangat erat, seperti mata uang. Ketika agama menerima wahyu normatif, biasanya agama itu tidak dapat diubah. Terlepas dari kenyataan bahwa kebudayaan muncul sebagai hasil kecerdikan manusia, kebudayaan terus berkembang dan bertransformasi seiring dengan berjalannya waktu. Penting untuk dicatat bahwa kesenjangan ini tidak menutup kemungkinan terwujudnya kehidupan keagamaan dalam

³⁰ Abdurrahman Wahid. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS 199,) Hal. 8.

representasi seni. Lebih lanjut, menurut pernyataan Gus Dur, proses pembauran agama dan budaya akan terus menjadi proses yang memperbaiki kehidupan dan mengurangi kekeringan melalui proses pencampuran. Keberagaman ekspresi budaya memungkinkan terciptanya ikatan antar kelompok yang berbeda berdasarkan kesetaraan.

Kekhawatiran akan adanya antagonisme antara budaya dan agama bukanlah alasan dilakukannya upaya-upaya tersebut karena jika dibiarkan begitu saja, ketegangan-ketegangan tersebut dengan sendirinya akan hilang. Misalnya, minat ulama membicarakan rambut gondrong sudah berkurang³¹.

Islam yakni sebuah konsep yang harus dihormati dalam kehidupan berbangsa. Sesuai pernyataan Gus Dur, pribumisasi lebih dilakukan demi melestarikan budaya ketimbang mencegah bangkitnya perlawanan kekuatan budaya lokal. Dorongan untuk mencegah perpecahan yang tak terhindarkan antara agama dan budaya yakni inti dari Islam pribumi.

Sesuai pernyataan teori Abdurrahman Wahid, Islam yakni agama yang menjunjung tinggi realitas pluralitas budaya saat ini dan menghormati keadaan lokal sebab seluruh simbol ataupun identitas harus mengenakan bahasa Arab, Gus Dur dengan keras menentang “satu Islam” dalam representasi budaya. Homogenitas yang serupa bukan hanya membungkam orisinalitas budaya umat namun juga memisahkan Islam dari budaya nasional yang dominan. Kita menjauh dari akar budaya kita sendiri sebagai akibat dari proses kehancuran Arabisasi, yang mana artinya yakni penaklukan kawasan non-Arab serta pertumbuhan budaya Arab terhadap populasi non-Arab “Umat Arab Kristen”, yang mengakibatkan adanya adopsi mereka terhadap Bahasa Arab ataupun pemasukan Budaya Arab serta Identitas Arab.

b) Agama dan Etika Sosial

Konsepsi Abdurrahman Wahid tentang etika masyarakat berbeda dengan cara Beliau menafsirkan gagasan Islam tentang moralitas, yang tidak dianggapnya sebagai persoalan moralitas pribadi. Namun Abdurrahman Wahid memandang nilai-nilai sosial Islam memberikan landasan

³¹ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) hal.99

bagi pemenuhan eksistensi sosial di samping memberikan pedoman normatif kesopanan pribadi. Dalam kata-katanya sendiri:

“Bukanlah maksud dari sabda Nabi, “Bahwasanya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak.”

Hanya jika pekerjaan ini mencakup penanaman pemahaman mendalam tentang etika sosial masyarakat nasional barulah keluhuran moral tampak rasional untuk dikembangkan. Islam mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan prinsip-prinsip sosial yang memungkinkan peningkatan eksistensi manusia.

Upaya Abdurrahman Wahid untuk menempatkan ajaran Islam dalam dinamika dan permasalahan umat manusia yakni komitmen etika sosialnya. Khususnya terkait dengan kemanusiaan dan Indonesia. Islam sejatinya akan menjadi solusi setiap persoalan bangsa dengan cara ini tanpa mengorbankan cita-cita moralnya sebagai agama yang agung.

c) Agama dan Demokrasi

Demokrasi dan agama saat ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat ketika gerakan keagamaan secara aktif membantu melestarikan agama. Apalagi hal ini terjadi di Indonesia ketika sistem politik menjadi semakin otoriter, para pemimpin gerakan keagamaan memperjuangkan demokrasi alih-alih perjuangan kemerdekaan nasional dari kolonialisme. Kelompok agama terlibat langsung dalam upaya melindungi demokrasi karena permasalahan degradasi lingkungan berkaitan dengan persoalan kebebasan berpikir dan berserikat.³²

Sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid, Dunia Islam sedang mengembangkan tiga sudut pandang dasar pada abad ke-21. Pertama, ada gagasan untuk mendirikan negara yang Islami secara eksklusif, seperti Iran dan Arab Saudi. Kedua, gagasan bahwasanya Islam yakni agama negara yang diakui berada pada suatu negara, namun negara tersebut bukanlah Negara Islam, seperti Malaysia. Ketiga, meskipun tidak ada hubungan formal antara negara dan agama, namun Islam juga

³² Arif Pratama Susila, “Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Agama”, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* (2017) hal. 26 <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1874277>

telah dibenarkan pada suatu negara. Contoh dari negara tersebut yakni Indonesia. Indonesia telah membenarkan penggunaan syariah seperti adanya Bank Syariah dan Aceh yang yakni salah satu provinsi di Indonesia yang menggunakan syariat Islam dalam menjalankan sistem peraturan di daerahnya seperti ketentuan hukum pidana Islam yang pelaksanaannya diatur Peraturan Daerah (Perda) ataupun di Aceh disebut sebagai Qanun Aceh

Abdurrahman Wahid berpendapat tidak pantas saling menyalahkan atas munculnya ketiga sudut pandang tersebut karena yakni hasil logis dari perkembangan sejarah. Jika ingin menciptakan hubungan antara agama dan negara, dalam melakukannya harus pada konteks sejarah yang tepat. Jika tidak, mustahil mendirikan Negara Islam. Apakah sudah jelas apakah *Ahl Al Hall Wal 'Aqd* ataupun orang lain yang akan mengambil keputusan akhir, begitu pula dengan perlunya kepemimpinan pemerintahan. Apakah masih mungkin untuk menjaga warisan Quraisy, jika tidak, bagaimana cara untuk menciptakan standar baru. Umat Islam harus mengakui bahwasanya mayoritas dunia Islam hanya bisa memelihara hubungan negara dan melindungi hak umat Islam untuk menjalankan agamanya sesuai dengan hukum, meskipun Islam tidak diakui oleh negara sebagai agama resmi.

4. Islam dan Negara (Indonesia)

Negara Indonesia yakni puncak dari upaya jangka panjang umat Islam untuk mendirikan negara di nusantara. Para pemimpin Islam menggunakan para pemimpin nasionalis sebagai sarana utama ekspresi ideologis mereka dalam upaya menjadikan Islam sebagai sistem sosial di seluruh nusantara, namun nampaknya masyarakat Islam tidak menyadari masalah ini karena sudah diketahui bahwasanya tidak ada gerakan Islam yang berhasil melakukan mobilisasi dukungan massa yang cukup untuk mendukung ideologi para pemimpin.

Bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh otoritas Islam, mayoritas umat Islam lebih cenderung hanya mengadvokasi kesadaran nasional dalam arti yang umum. Sedikitnya jumlah jawaban yang terdokumentasi ataupun terorganisir dengan baik terhadap ide-ide mereka yakni bukti dari kenyataan yang tidak menyenangkan ini. Oleh karena itu, tumbuhnya kesadaran nasional perlu kita akui sebagai motor penggerak gagasan-gagasan yang menjadi pedoman hidup kita sebagai sebuah bangsa.

Justifikasi substantif penyelesaian struktur Negara Indonesia juga ditegaskan oleh Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwasanya “Negara kita menghormati keabsahan peran agama dalam kehidupan masyarakat, jika diperlukan melalui jalur resmi. Pancasila secara implisit mendukung pemerintahan yang menjunjung tinggi agama. kehidupan walaupun secara jelas tidak memberikan landasan teologis bagi kehidupan bernegara.”³³

Keputusan Gus Dur untuk menolak menjadikan Islam sebagai falsafah dan rujukan resmi negara sejalan dengan preferensi sebagian besar masyarakat yang tinggal di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Pembelaan Gus Dur terhadap Islam di negara yang tidak berlandaskan Islam seperti ini tidak memformalkan Islam.

Beliau mengklaim bahwasanya negara ini dan rakyatnya tidak sepenuhnya tergabung dalam gerakan Islam. Selain itu, hal ini sejalan dengan perjuangan Gus Dur untuk pluralisme. Gus Dur meluncurkan perjuangan pluralistik yang kedua perjuangan untuk pluralitas teologis karena premis yang satu sudah tidak berlaku lagi. Hal ini berarti tidak melakukan diskriminasi terhadap agama selain Islam.

Masyarakat harus mempunyai pilihan untuk mengikuti dan menerapkan hukum agamanya sesuai dengan pandangan dan keyakinannya masing-masing di negara multikultural seperti Indonesia. Klaim di atas tidak menjelaskan lebih jauh mengenai keberagaman agama, budaya, suku, dan kelompok, selain menyatakan bahwasanya mayoritas masyarakat Indonesia menganut paham sekuler dalam artian mereka berupaya untuk membedakan urusan agama dengan kegiatan pemerintahan.

Tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam, maka akan tetap ada perbedaan dalam masyarakat Indonesia meskipun Indonesia menganut Islam sebagai agama resmi dan menerimanya sebagai dasar negara. Berdasarkan hal tersebut, NU yakni kelompok Islam pertama yang mengakui Pancasila sebagai doktrin negara yang sah.³⁴

Dari situlah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan tegas menyatakan bahwasanya bangsa yang menganut ideologi

³³ Abdurrahman Wahid. *Membangun Demokrasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 8

³⁴ Andree Feillard, *NU Vis A Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), Halaman 233-261.

Pancasila yakni bangsa damai yang harus dijaga karena umat Islam di sana tetap menjunjung tinggi syariah baik berupa hukum agama, fiqh, maupun etika masyarakat meskipun demikian. Walaupun tidak tercermin dalam peraturan perundang-undangan negara, Islam yakni satu pembenaran untuk menjaga etika sosial sebagai syarat agama jika hal itu diamalkan. Dari situlah tanggung jawab untuk menaati hukum berasal.

5. **Tantangan Abdurrahman Wahid dalam Penyampaian Mengenai Relasi Agama dengan Negara dan Relevansinya dengan Keadaan Masa Kini**

Dalam pengertian ini, agama yakni salah satu sumber Pancasila di samping sumber-sumber lain, sebagai sumber pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini yakni hubungan mendasar antara Islam dan Pancasila. Filsafat negara dan kehidupan bernegara, dalam hal ini Pancasila, dibangun berdasarkan sejumlah asas mulia yang terdapat dalam Islam, sekaligus menjamin hak umat beragama untuk menjalankan keyakinannya. Oleh karena itu, dapat dikemukakan hal-hal berikut mengenai bagaimana Islam dan negara berinteraksi melalui cita-cita yang diperoleh Pancasila dan diwujudkan dalam bentuk pedoman hidup bernegara, Islam turut memberikan motivasi dalam aktivitas individu.³⁵

Keterkaitan antara agama dan ideologi negara telah lama terganggu oleh kesalahpahaman ini sehingga membuat kehidupan politik tidak stabil di sebagian besar negara-negara berkembang. Pada keadaan ini, banyak energi yang terbuang hanya untuk mencegah gerakan keagamaan yang dianggap berpotensi menentang ideologi negara menyebarkan pengaruhnya. Dampak lainnya yakni kemajuan yang awalnya dimaksudkan untuk dilindungi dari “gangguan” kelompok agama dengan mengambil langkah-langkah “keamanan politik” menjadi melambat ataupun bahkan terhenti.

Abdurrahman Wahid berpandangan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan pada persoalan ini. Sesuai pernyataannya, wacana politik harus dirancang untuk membungkus kebenaran yang tidak menyenangkan sedekat mungkin untuk mencegah lebih banyak kerusakan yang dapat memperburuk situasi. Beberapa tantangan tersebut antara lain :

³⁵ Abdurrahman Wahid. *Prisma Pemikiran Gusdur*. (Yogyakarta: LKIS 1999), Halaman 5.

- a. Adanya inisiatif, retorika politik dan kelompok agama yang dijinakkan oleh pemerintah

Sejumlah inisiatif dan retorika politik digunakan untuk melemahkan gerakan keagamaan. Di satu sisi, kelompok agama “dijinakkan” dengan dana resmi yang besar untuk ibadah ritual, namun di sisi lain, mereka terpacu dengan upaya membungkam gerakan keagamaan yang bercita-cita mempengaruhi politik dengan cara yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah³⁶.

Maksud dari kelompok agama “dijinakkan” yakni adanya inisiatif pemberian dana yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok agama dengan maksud agar kelompok agama tetap pada batasnya dan tidak sampai pada tindakan radikal ataupun tindakan yang ekstrim. Contohnya seperti pemberian dana pada pesantren, pemberian beasiswa kepada santri dan dibentuknya Kampung Moderasi. Hal ini juga yakni salah satu retorika politik dari pemerintah. Sehingga, adanya kegiatan pemerintah memberikan kucuran dana bantuan dapat disalah artikan sebagai sarana untuk membungkam kritik bagi pemerintah dan membuat batasan bagi para kelompok agama.

Namun, sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid tindakan tersebut tidak baik untuk dilakukan, karena sebaiknya agama dan negara harus berjalan masing-masing dengan apa adanya, tapi tetap seimbang dan saling melengkapi dengan negara. Abdurrahman Wahid, berupaya mencerminkan hubungan agama dan negara dengan menawarkan sinergi. Dalam benaknya, Beliau melihat besarnya tantangan kemajuan yang disebabkan oleh salah tafsir terhadap cita-cita negara berkembang³⁷. Pendapat Gus Dur tersebut membentuk dukungan terhadap jalannya proses demokrasi yang membebaskan kemampuan berpendapat dan kritikan terhadap pemerintah. Lebih lanjut Gus Dur menegaskan, nasionalisme dan Islam tidak bertentangan. Islam dapat tumbuh secara spiritual bahkan di negara-negara yang bukan agama resminya.

³⁶ Abdurrahman Wahid. *Prisma Pemikiran Gusdur*. (Yogyakarta: LKIS 1999), Halaman 2.

³⁷ Abdurrahman Wahid. *Prisma Pemikiran Gusdur*. (Yogyakarta: LKIS 1999), Halaman 3.

Sesuai pernyataan Gus Dur, perlu dirumuskan lebih jelas lagi mengenai pemisahan antara agama dan negara karena pada kenyataannya ketakutan akan hilangnya unsur-unsur agama dari kehidupan pemerintahan inilah yang memicu adanya kebutuhan palsu yang oleh mereka yang merasakannya. Hal tersebut cukup serius untuk dilakukannya formalisasi tugas keagamaan pemerintah di bidang agama.³⁸

Melihat justifikasi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, menimbulkan pertanyaan tentang apa kedudukan agama dalam urusan bernegara dan politik. Gus Dur sangat menekankan pentingnya agama sebagai etika sosial dalam menanggapi pertanyaan ini, yang menunjukkan bahwasanya Islam memiliki peran yang saling melengkapi dalam kehidupan berbangsa. Islam akan kehilangan cita-cita esensialnya, yang mendukung penegakan keadilan, kesetaraan, dan demokrasi, jika Islam dipaksa mengambil peran sekunder dalam negara.³⁹

Para intelektual Islam Indonesia lainnya belum membahas hal ini secara luas. Sayangnya, Gus Dur tidak mengembangkan gagasannya tentang etika sosial secara lebih ortodoks. Islam mempunyai dua tujuan dalam kehidupan berbangsa. Pertama yakni moralitas sosial kolektif (etika sosial) masyarakat dan yang kedua yakni partikel-partikel aktual yang bisa dilaksanakan dengan proses konsensus. Terbukti dari hal ini, Gus Dur tidak pernah membayangkan sebuah bangsa yang secara teknis menganut teologi Islam namun prinsip-prinsip Islam sudah tertanam dalam diri setiap umat Islam di Indonesia.

Etika sosial Gus Dur memunculkan persoalan bagaimana pengaruhnya terhadap proses legislasi. Faktanya, Gus Dur terletak di luar pemerintahan dan aktif menentang semua inisiatif pemerintahan Orde Baru saat itu. Gus Dur mengatakan, berbeda dengan pemerintahan seperti Republik Indonesia yang tidak memaksakan nilai-nilai yang tidak dianut seluruh warganya dan berasal dari beragam agama dan pandangan hidup, Islam sebagai agama justru memaksakan norma-norma normatif dalam kehidupan. kehidupan orang-

³⁸ Einar M. Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), Halaman 15.

³⁹ Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Pancasila*, (Yogyakarta; Pustaka pelajar, 1999), Halaman 130

orang yang beriman ketika mereka menjalani kehidupannya. Hal inilah yang disebutnya sebagai partikel agama yang berpotensi menyusup ke negara dalam bentuk hukum. Dengan kata lain, tidak semua aturan normatif Islam dapat diterapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan rangkuman di atas, Gus Dur mempunyai pemikiran tentang bagaimana agama dan negara sekuler ataupun semi sekuler berinteraksi. Gus Dur bahkan sampai menegaskan bahwasanya tidak semua norma normatif Islam bisa diterapkan dalam urusan negara kita. Gus Dur berpendapat bahwasanya hukum Islam sebenarnya hanya berlaku sebagai pedoman moral yang dilakukan atas dasar kesadaran masyarakat dalam situasi dimana norma-norma normatif tersebut dapat diterapkan secara penuh dan luas. Namun, kebutuhan untuk menyebarkan hukum agama ataupun fiqh terkendala oleh apa yang bisa dilakukan.

b. Adanya kelompok radikal

Islam tidak bisa menjadi agama resmi Indonesia, sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid. Pendekatan ilmu agama dan kaderisasi dilanjutkan dalam pemikiran ke-Islaman Abdurrahman Wahid dalam konteks Islam kosmopolitan, yakni berkaitan dengan keterkaitan antara agama dan nasionalisme. Namun, permasalahan bangsa dapat diselesaikan dengan menjadikan Islam sebagai unsur pelengkap di samping unsur bangsa lainnya. Penggunaan Islam secara legal dan formal dalam prinsip-prinsip kenegaraan diyakini dapat menimbulkan masalah psikologis bagi non-muslim yang juga yakni warga Indonesia dan berperan dalam pembangunan bangsa.

Ikatan kebangsaan yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa Indonesia akan melemah jika hal itu terjadi. Abdurrahman Wahid lebih memilih tinggal di negara dimana umat Islam bisa membela *tauhid* dan menerapkan syariat tanpa perlu menggunakannya sebagai dasar peraturan perundang-undangan. Kemampuan umat Islam dalam menerapkan syariah dalam kehidupan sehari-hari, bukan proses mengakui Islam sebagai sumber hukum yang sah dalam masyarakat luas. Wawasan kebangsaan yakni fakta sejarah yang tidak terbantahkan tentang apa artinya menjadi orang Indonesia. Inilah alasan yang dikemukakan Abdurrahman Wahid untuk mendukung perlunya

memasukkan Islam sebagai etika sosial yang menempatkan Islam sebagai kekuatan penyeimbang dalam masyarakat Indonesia yang beragam.⁴⁰

Gus Dur cukup terbiasa menyamakan agama (Islam) dengan Pancasila ketika membahas bagaimana agama dan negara berinteraksi di Indonesia. Gus Dur menyoroti pentingnya menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Gus Dur menetapkan Pancasila sebagai landasan konstitusi bangsa dan negara. Filsafat ini menjadi dasar konstitusi dan tidak bertentangan dengan agama, tidak berusaha menggantikannya, dan tidak dianggap sebagai agama.

Perbincangan mengenai hubungan antara agama (Islam) dan negara semakin diwarnai oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dan masyarakat Indonesia dalam menerapkan syariat Islam dan hukum-hukumnya. Ada tiga cara untuk mendekati hubungan agama dan negara yakni secara integratif, fakultatif, dan konfrontatif. Pendekatan Islam yang integratif sepenuhnya menghapuskan pendirian formalnya dan sama sekali tidak mengaitkan doktrin agama dengan kebijakan publik. Gaya hidup sosial mereka membentuk interaksi antara kehidupan mereka dan negara.

Adanya kelompok radikal yang berupaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan hukum Islam di Indonesia akan berdampak pada rusaknya tatanan negara Indonesia. Contoh dari kelompok tersebut yakni Majelis Muhajidin Indonesia (MMI). Kelompok ini tidak ingin mengganti ideologi Pancasila, namun menginginkan bahwasanya seluruh hukum di Indonesia harus menggunakan hukum Islam. Selain itu, ada pula Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang menginginkan untuk ditegakkannya syariat Islam diberbagai daerah.

- c. Peranan latar belakang pendidikan dan budaya serta minimnya Undang-Undang yang mengatur keyakinan beragama

Latar belakang pendidikan dan budaya masing-masing berperan dalam menentukan apakah seseorang masuk

⁴⁰ Mahar Tri Pamungkas, Hermanu Joebagio, dan Saiful Bahri, "Abdurrahman Wahid: Study Pemikiran Tentang Relasi Agama dan Negara", *Jurnal Candi*, hal 35. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sejarah/article/view/12086/8586>

Islam sesuai dengan norma. Agama dalam hal ini menyebarkan ajarannya melalui budaya. Jika pendidikan dan budaya membuat terjadinya tantangan dalam relasi agama dan negara, maka perlu dikaji lebih lanjut dari latar belakang kehidupan seorang individu. Pemerataan pendidikan di Indonesia yang masih rendah, menyebabkan rendahnya daya kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku. Selain itu, kurangnya pendidikan membuat masyarakat tidak bisa memahami esensi negara dan agama yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid.

Demikian pula dalam tingkat legislatif, masih terdapat banyak celah yang timbul akibat kurangnya Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan berkeyakinan. Sebaiknya, DPR memprioritaskan disahkannya Undang-Undang yang mendorong kebebasan beragama. Hal ini harus dilakukan karena masih ada konflik antar umat beragama di Indonesia. Contohnya yakni pembangunan gereja yang ditentang dan terkucilkannya agama minoritas seperti Baha'i dan Ahmadiyah. Gaya konfrontatif sejak awal menentang adanya apa pun yang dianggap bertentangan dengan Islam.

Dilihat dari relevansinya dengan hubungan agama dan negara saat ini, perlu kita pahami bahwa hubungan antara agama (Islam) dan negara secara keseluruhan dipandang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara, khususnya bila pembangunan dilakukan di negara-negara yang masih dalam proses berkembang. Urgensi dari situasi ini terletak pada kenyataan bahwa kita perlu mengatasi pengaruh banyaknya data yang menunjukkan hambatan besar terhadap kemajuan. Kesulitan-kesulitan ini diakibatkan oleh miskomunikasi yang mendalam antara mereka yang memerintah ideologi resmi dan para pemimpin kelompok agama.

Islam berfungsi sebagai etika sosial yang akan mengarahkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang luhur, karena pada akhirnya manusiakni yang menjadi sasaran upaya perbaikan kehidupan. Islam tidak berfungsi sebagai negara tertentu. Namun Islam akan membentuk etika sosial berkehidupan di masyarakat.

Meskipun Indonesia menganut Islam sebagai agama resmi dan mengakuinya sebagai dasar negara, namun masih terdapat perbedaan dalam masyarakat Indonesia karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam. Atas dasar itu, agama memerlukan negara sebagai instrumen dalam rangka memelihara dan mengembangkan praktik keagamaannya. Di sisi lain, negara juga

membutuhkan agama karena akan membantu negara dalam pengembangan moralitas dan etika. Dengan ini pemikiran dari Abdurrahman Wahid memiliki dampak untuk mengatasi terhambatnya sistem negara dengan menggunakan pemikiran relasi agama dan negara pada masa ataupun keadaan saat ini.

